BAB III

SEJARAH, KONDISI DAN PERKEMBANGAN NEGARA KROASIA

Kroasia merupakan salah satu negara kawasan Eropa Timur yang memilih untuk tidak lagi tunduk dalam bayang-bayang kepemimpinan Yugoslavia. Keinginan untuk mencari perubahan demi menciptakan kesejahteraan membuat Kroasia memilih untuk secara perlahan melepas paham komunis dan mencoba menjalin hubungan luar negeri untuk membantu finansial pasca perang saudara yang terus terjadi sebelum maupun sesudah merdeka.

Perang Kroasia dan Perang Balkan merupakan peristiwa besar yang membawa Kroasia kepada titik nadirnya sebagai sebuahnya negara. Secara ekoomi, politik keamanan dan sosial Kroasia merupakan salah satu yang terburuk pada saat itu sehingga perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan bantuan dari luar merupakan dua poin wajib yang dijalankan dan harus dimiliki oleh negara yang berbatasan dengan Slovenia dan Hungaria ini.

Kedatangan Uni Eropa ke wilayah Balkan untuk memperluas pengaruhnya tidak disia-siakan Kroasia untuk menjalin kerjasama untuk perbaikan ekonomi, sosial, dan politik.

A. Sejarah Kroasia

Kroasia menjadi bagian dari negara federal Yugoslavia sejak tahun 1918. Terdapat enam negara republik dalam federasi Yugoslavia yaitu Bosnia, Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, dan Slovenia. Selain itu, Yugoslavia juga mempunyai dua daerah otonomi khusus yaitu Kosovo dan Vojvodina. Yugoslavia beribukota di Beogard dan hingga tahun 1941, Serbia memiliki peran yang penting dalam pemerintahan negara Federal Yugoslavia (Gagnon, 1995).

Varaždin Cepino Savudrija Vinkovci Rovinj o Slavonski Plitvice Lakes Brod Pula o National Park Point Kamenjak BOSNIA-Knin Split & Solin **Imotski** SERBIA & ITALY MONTENEGRO 100 km Korcula 120 miles Mljet Dubrovnik ALBANIA Oštri

Gambar III.1. Peta Negara Kroasia

B. Profil Negara Kroasia

Pada bulan Juni tahun 1991, Kroasia secara resmi menjadi negara merdeka. Kroasia ialah negara kesatuan Republik yang menganut sistem parlementer. Luas wilayah negara ini sekitar 56.594 km persegi dengan luas wilayah laut 575 km persegi. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari, bahasa yang digunakan adalah bahasa Kroasia. Mayoritas penduduk Kroasia beragama Katolik dengan persentase sebesar 81,3%, agama ortodoks sebanyak 4,4%, agama Islam 1,5% dan 7,8% beragama lainnya. Jika dipandang secara etnis, maka etnis Kroasia terdiri dari 90,4%, etnis Serbia 4,4%, dan etnis lainnya sekitar 4,4% yang terdiri dari Bosnia, Hungaria, Ceko dan Albania. Selain itu, Kroasia juga memiliki situs kebudayaan yang telah diakui oleh UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) yaitu Taman Nasional Plitvice dan Kota Dubrovnik (http://www.kemlu.go.id/zagreb/Books/Facts%20Figure-Croatia-3_01.jpg).

a. Kondisi Sistem Politik dan Keamanan

Sebelum merdeka dan menjadi negara berdaulat Kroasia tentu saja menganut paham Komunis yang diterapkan secara menyeluruh oleh negara federal Yugoslavia. Kuatnya pengaruh Yugoslavia juga tidak hanya dirasakan oleh Kroasia tetapi juga oleh lima negara lainnya. Namun gejolak politik dan keamanan mulai menjadi isu penting ketika beberapa negara dibawah pengaruh Yugoslavia berusaha untuk lepas dan menjadi negara merdeka.

Kondisi tidak ideal dirasakan Kroasia ketika pecahnya kekuasaan politk dan pengaruh Yugoslavia yang menyebabkan beberapa perang yang mengakitbatkan kerugian massif secara materil maupun korban jiwa. Kroasia akhirnya mulai meninggalkan sistem Komunis yang dianut dulu dan mengubah sistem pemerintahan mereka menjadi Parlementer

Sistem pemerintahan Kroasia adalah sistem Parlementer yang telah digunakan sejak tahun 1990. Anggota parlemen Kroasia bejumlah 100 hingga 160 orang yang dipilih secara langsung untuk masa jabatan empat tahun. Pembentukan struktur internal parlemen telah di atur dalam tata tertib yang disahkan oleh kepala negara. Parlemen mengemban peran yang sangat penting dalam menjalankan roda perpolitikan di Kroasia. Tugas parlemen ialah memberlakukan hukum dan APBN, memutuskan pemberlakuan amandemen dan konstitusi, membuat strategi pertahanan dan keamanan nasional, mengambil keputusan untuk menyatakan perang atau damai, memutuskan perubahan tapal batas negara, melakukan pengawasan terhadap sipil dan angkatan bersenjata, dan mengangkat serta memberhentikan pejabat negara. Tidak hanya itu, parlemen juga dapat memberikan amnesti dalam kasus tindak pidana. Selanjutnya, Ombudsman Kroasia diberikan hak penuh oleh parlemen Kroasia untuk melindungi hak-hak konstitusional dan hukum warga negara serta lembaga-lembaga lainnya. Ombudsman dipilih oleh parlemen Kroasia untuk jangka waktu delapan tahun.

(http://www.sabor.hr/Default.aspx?sec=713)

Dalam bidang militer, angkatan bersenjata Kroasia mempunyai tiga angkatan bersenjata dan satu sekolah pendidikan yaitu Angkatan Darat (Hrvatska Kopnena Vojska, HKoV), Angkatan Laut dan pasukan penjaga pantai (Hrvatska Ratna Mornarica, HRM), Angkatan Udaradan Komando Pertahanan Udara (Hrvatsko Ratno Zrakoplovstvosaya Protiv Zracna Odbrana), serta Pendidikan dan Komando Pelatihan serta Komando Logistik.

b. Kondisi Ekonomi

Produk utama Kroasia adalah pertanian dan peternakan yaitu gandum, jagung, gula, bunga matahari, kentang, kubis, bawang, tomat, lada, apel, jeruk, zaitun, anggur. Sedangkan untuk peternakan terdiri dari sapi dan babi yang hasil perahan susunya juga dapat dikonsumsi.

Selain itu, Kroasia juga memproduksi bahan kimia dan plastik, peralatan mesin, logam, elektronik, produk baja, aluminium, kertas, produk kayu, bahan bangunan, tekstil, dan minyak bumi (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/hr.html).

Pada saat Kroasia mengalami masa transisi antara lepas dari pengaruh Yugoslavia dan mendeklarasikan kemerekaannya, kondisi ekonomi juga turut dipengaruhi oleh siatusi keamanan dan politik saat itu. Kroasia yang tengah terlibat perang dengan Serbia dan Bosnia harus mengalami krisis ekonomi dimana kurangnya dana dari dalam negeri dan membengkaknya hutang luar negeri demi membantu menutupi kebutuhan nasional saat itu.

Perlahan kondisi Kroasia mulai membaik ketika menjalin kerjasama dengan Uni Eropa yang sangat membantu dalam pemulihan kondisi perekonomian hingga saat ini Kroasia mampu dengan sendirinya menciptakan kestabilan secara pendapatan ekonomi baik dari eksporimpor maupun hasil produk dalam negeri.

Saat ini sumber pendapatan ekonomi Kroasia ditentukan oleh sumber daya alam, teknologi dan perindustrian misalnya kapal, konstruksi, petrokimia, dan industri makanan. Selain itu, bidang pariwisata juga ikut menyumbang perekonomian Kroasia dengan sekitar 10 juta tamu asing yang berkunjung setiap tahunnya. Namun permasalahan yang dihadapi oleh Kroasia sama seperti negara lain pada umumnya yaitu tingkat pengangguran yang sukup tinggi. Dalam hal perdagangan internasional, Kroasia mempunyai mitra dagang yang cukup strategis seperti Italia, Jerman, Slovenia, Austria, Bosnia, Herzegovina, dan Serbia. (Crijenko, 2013)

c. Kondisi Sosial

Kroasia merupakan negara yang didomisili oleh beberapa etnis, agama dan suku yang berbeda. Namun keberagaman yang dimiliki Kroasia saat masih dala kekuasaan Yugoslavia tidak dibarengi dengan kuatnya toleransi suku maupun etnis. Salah satu faktor internal pecahnya Yugoslavia ialah karena masalah kesukuan diantara negara-negara di dalamnya yang merasa bahwa susku atau etnis mereka lebih tinggi dan besar daripada suku lainnya.

Terjadinya Perang Bosnia juga melibatkan isu dan perseteruan antara etnis Koasia, etnis Serbia, dan Etnis Bosniak yangh saat itu memiliki kepentingan wilayah di sekitar Bosnia-Herzegovina. Namun setelah perang Bosnia dan masuknya Uni Eropa beserta paham demokrasinya, Kroasia mulai 'ramah' secara sosial untuk membuka kerjasama dan mendapatkan bantuan finasial. Saat ini masyarakat Kroasia menganut dan mengakui beberapa agama besar dan hidup secara berdampingan dengan agama Kristen menjadi populasi terbanyak. Kehidupan berbagai etnis juga sudah tidak menjadi masalah besar karena terdapat etnis Serbia, Hungaria, Bosnia dan Ceko yang tinggal di Kroasia dengan damai.

C. Kroasia Sebelum Merdeka

Sebelum mencapai kemerdekaannya, Kroasia merupakan negara bagian dari negara federal Yugoslavia. Namun faktor Perang Dunia dan desakan referendum dari pihak internal memaksa Kroasia berani mengambil sikap untuk merdeka dan menjadi awal runtuhnyha kedigdayaan Yugoslavia.

a. Yugoslavia

Yugoslavia adalah negara federasi yang terdiri dari Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, dan Montenegro. Mayoritas negara ini didiami etnis Slavia Selatan. Namun sejak reskontrukturisasi politik (demokratisasi), Yugoslavia, Kroasia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina dan Slovenia menjadi negara merdeka.

Selama beberapa abad, hampir seluruh Slavia Selatan terbagi-bagi dan dikuasai oleh kekuasaan asing, khususnya Australia, Hongaria dan Kerajaan Ottoman. Menjelang akhir abad ke-18, hanya Serbia dan Montenegro yang merdeka. Pada saat itu, beberapa negara di Slavia Selatan memiliki ide pembentukan Yugoslavia (yang berarti tanah orang Slavia Selatan) untuk menyatukan orang-orang Slavia yang bebas dan memerintah sebuah negara sendiri (http://www.sejarah-negara.com/2014/04/latar-belakangyugoslavia.html).



Gambar III.2.Gambar peta Yugoslavia

(http://sejaraheropa.wixsite.com/offering-b-2014/single-post/2015/04/16/Konflik-Yugoslavia)

b. Pecahnya Yugoslavia

Yugoslavia sepertinya merupakan Negara yang sudah di takdirkan dengan berbagai macam konflik. Sejak awal berdirinya, konflik-konflik sudah banyak bermunculan baik dari dalam ataupun luar. Namun pemimpin terbaik dari Yugoslavia yaitu Josif Broz Tito memiliki ideologi menarik yang selalu di pegangnya yaitu "Even a bad Yugoslavia is better than no Yugoslavia" (Lampe, 2000).

Konflik internal di sebabkan oleh perasaan kesukuan yang selalu ada di antara republik-republik Yugoslavia, yang memiliki ciri berbeda satu sama lain. Yugoslavia terdiri dari berbagai keturunan suku bangsa. Sebelum pecah 36 persen suku Serbia, 20 persen Kroasia, 9 persen keturunan Muslim Bosnia, persen suku Slovenia, Masedonia 6 persen dan keturunan Albania 8 persen. Dan sebagai bekas jajahan Turki 400 tahun, di negara ini juga terdapat sejumlah besar keturunan Turki.

Sedangkan Konflik eksternal Di awali oleh penandatanganan persetujuan kerja sama dengan poros Jerman-Italia-Jepang oleh pangeran Paul yang di ikuti oleh pemberontakan oleh perwira Serbia anti-Jerman yang membuat Hitler marah dan pada tahun 1941 menyerang Yugoslavia. Setelah

menduduki Yugoslavia, Hitler menggabung Kroasia, Bosnia, dan Herzegovina ke dalam wilayah Negara Kroasia. Sementara Kosovo, Montenegro selatan, dan makedonia barat di gabung dalam Negara Albania Raya.

Gambar III.3. Presiden Yugoslavia saat itu, Josep Broz Tito



(http://e-nnw.com/josip-broz-tito/)

Penduduk Yugoslavia kemudian bangkit melawan, dalam buku Perang Eropa halaman 77 Volume 2 oleh Peng Koen Awjong, R. B. Sugiantoro, di tulis pendapat dari Churchill yang mengatakan bahwa "keberanian adalah sifat dan watak pembawaan dari bangsa Yugoslavia". Pendapat Churchil di perlihatkan dengan bangkitnya penduduk Yugoslavia untuk mengusir pasukan pendudukan dengan bergabung dengan dua kekuatan gerilya utama yaitu kaum Chetnik yang didominasi orang Serbia pendukung raja dan kaum Partisan pimpinan Tito. Kaum chetnik di pimpin oleh Pahlawan pertama yang

melawan jerman yaitu Kolonel Draza Mihailovich yang seorang mantan menteri pertahan Yugoslavia. Sementara perlawanan Josif Broz Tito dengan partisannya baru di mulai setelah jerman menyerang Rusia pada juni 1941.

Pada bulan April 1945, pasukan Partisan berhasil menguasai wilayah Yugoslavia dan memaksa pasukan jerman untuk angkat kaki. Pada bulan November 1945 Josif Broz tito berhasil memenangkan pemilu dan pada 29 November 1945 Kerajaan Yugoslavia di bubarkan dan di gantikan oleh Bentuk Republik yang di namakan Republik Rakyat Federal Yugoslavia dengan Boznia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, dan Slovenia sebagai Negara penyusun.

Sepeninggal Tito, Diskiriminasi ras mulai muncul di dalam tubuh Yugoslavia. Setelah sekian lama Tito berhasil meredam untuk timbulnya penyakit itu muncul ke permukaan. Semakin parahnya krisis yang menimpa Yugoslavia pada gilirannya turut berdampak pada melonjaknya inflasi dan membludaknya pengangguran. Dikombinasikan dengan dendam lama warisan Perang Dunia II, hubungan antar etnis yang menghuni yugoslavia semain lama semakin memanas.

Pada bulan Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan. Tentara Federal (terutama beranggotakan orang Serbia) mengintervensi. Akan tetapi perang di Slovenia hanya berlangsung 7 hari

karena penduduk di sana nyaris homogen sehingga tidak ada kepentingan warga Serbia yang terancam. Dibandingkan dengan Slovenia yang memiliki penduduk homogen, perang di Kroasia berlangsung sengit dan lama serta kejam karena ingatan sejarah Perang Dunia II maupun besarnya komunitas Serbia di wilayah tersebut. Ketika Republik Makedonia, negara bagian termiskin, memerdekakan diri, Tentara Federal diam saja. Pada tahun 1992 Penduduk Muslim dan Kroasia di Bosnia -Herzegovina memilih untuk merdeka dan mendeklarasikan negara Bosnia-Herzegovina. Penduduk Serbia Bosnia menolak hasil tersebut dan berusaha membentuk negara terpisah dengan bantuan Tentara Federal, yaitu Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina yang kemudian menjadi Republik Srpska. Sekali lagi, perang di Bosnia-Herzegovina berlangsung sengit dan kejam karena alasan trauma sejarah, pada tahun 1995 perjanjian Dayton yang bertempat di Pangkalan Udara Wright-Patterson di Dayton, Ohio. Pertemuan tersebut berlangsung sejak 1 November hingga 2 November 1995. Peserta utamanya adalah presiden Serbia, Slobodan Milošević, presiden Kroasia, Franjo Tuđman, presiden Bosnia, Alija Izetbegović, kepala negosiator Amerika Serikat, Richard Holbrooke dan Jenderal Wesley Clark. Persetujuannya ditanda tangani di Paris, Perancis pada 14 Desember. Dan dengan di tandatangani nya perjanjian itu berahir pula Bosnia-Herzegovina perang

(http://sejaraheropa.wixsite.com/offering-b-2014/single-post/2015/04/16/Konflik-Yugoslavia).

D. Kroasia Setelah Merdeka

Setelah memproklamirkan kemerdekaannya, Kroasia dihadapkan dengan masalah etnis yang melibatkan Serbia dan Bosnia. Beragamnya etnis yang bermukim di ketiga wilayah tersebut tidak bisa menghindarkan Kroasia dari perang besar yang disebut sebagai Perang Bosnia.

1. Perang Bosnia

Perang Bosnia (Bosnian War; Rat u Bosni) adalah sebutan untuk perang yang terjadi di wilayah Bosnia-Herzegovina (saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Yugoslavia) antara tahun 1992 hingga 1995. Secara garis besar, perang ini merupakan konflik bersenjata antara etnis Bosniak, etnis Kroasia / Kroat, & etnis Serbia / Serb yang memiliki kepentingannya masing-masing. Etnis Bosniak ingin menjadikan Bosnia sebagai negara merdeka. Etnis Kroasia ingin menggabungkan sebagian wilayah Bosnia dengan wilayah negara Kroasia. Sementara etnis Serbia yang sedang mendominasi pemerintahan Yugoslavia ingin mempertahankan keutuhan sisa-sisa wilayah Yugoslavia.

Perang Bosnia merupakan konflik terbesar & terparah dalam periode disintegrasi Yugoslavia yang berlangsung selama dekade 90-an. Selama perang, banyak terjadi aksi pembantaian antar etnis di mana aksi-aksi tadi

didominasi oleh pasukan dari etnis Serbia. Penyebab utama mengapa intensitas perang di Bosnia bisa sedemikian parah adalah karena Bosnia merupakan negara bagian Yugoslavia yang komposisi penduduknya paling beragam & lokasinya tepat berada di tengah-tengah Yugoslavia. Ketika perang berakhir, Bosnia menjadi negara merdeka dengan sistem pemerintahan yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah dominasi etnis tertentu dalam pemerintahan Bosnia.

Karena etnis-etnis yang terlibat dalam Perang Bosnia memiliki komposisi agama mayoritas yang berbeda 1 sama lain, Perang Bosnia lantas menjadi magnet bagi relawan-relawan asing untuk ikut berperang di Bosnia atas dasar solidaritas agama & etnis. Sebagai contoh, etnis Bosniak yang mayoritasnya beragama Islam dibanjiri oleh milisi-milisi mujahidin yang datang dari Timur Tengah & minoritas Muslim di negara-negara Barat. Sementara etnis Kroasia yang mayoritasnya Katolik mendapat bantuan dari para anggota Neo-Nazi di negara-negara Eropa Barat & Utara. Etnis Serbia yang mayoritasnya Kristen Ortodoks sendiri mendapat bantuan dari para relawan Yunani & negara-negara pecahan Uni Soviet.

Tanggal 6 April 1992 organisasi Uni Eropa menyatakan pengakuannya atas kemerdekaan Bosnia. Sehari kemudian, giliran Amerika Serikat yang menyatakan pengakuannya atas kemerdekaan Bosnia. Merasa geram karena dunia internasional memilih untuk mengakui Bosnia sebagai negara merdeka

alih-alih bagian dari wilayah Yugoslavia, militer Yugoslavia (Serbia) yang dibantu oleh milisi-milisi Serbia memulai invasinya ke ibukota Sarajevo & sekitarnya. Karena pasukan Serbia memiliki keunggulan dalam hal persenjataan, mereka sukses menduduki area di sekitar Sarajevo dalam waktu relatif singkat. Di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan oleh pasukan Serbia, banyak warga sipil Bosniak & Kroasia yang menjadi sasaran pembunuhan, penyiksaan, & pemerkosaan massal.

Bulan Juni 1992, pasukan Bosniak & Kroasia yang awalnya bersekutu terlibat konflik satu sama lain karena negara Kroasia berniat mencaplok wilayah Bosnia selatan yang populasinya didominasi oleh etnis Kroasia. Bosnia pun kini menjadi arena konflik segitiga antara etnis Bosniak, Kroasia, & Serbia. Seperti nasib saudara-saudaranya di Bosnia timur, orang-orang Bosniak yang berada di wilayah taklukan pasukan Kroasia juga menjadi sasaran pembantaian & pemerkosaan massal. Memasuki akhir tahun 1992, seluruh wilayah Bosnia selatan sudah berada di tangan pasukan Kroasia. Sementara wilayah Bosnia utara & timur berada di bawah kendali pasukan Serbia. Wilayah sisanya yang mencakup Bosnia tengah & barat laut merupakan wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan pasukan Bosniak.

Dunia internasional sendiri bukannya diam saja melihat situasi di Bosnia yang semakin berlarut-larut. Bulan Mei 1992, PBB menjatuhkan sanksi & pengucilan internasional kepada pemerintah pusat Yugoslavia. Sebulan

kemudian, pasukan perdamaian PBB (UNPROFOR) diterjunkan ke Bosnia. Lalu pada bulan April 1993, NATO atas izin PBB menerapkan zona larangan terbang di atas wilayah Yugoslavia. Di bulan berikutnya, PBB mengumumkan pendirian "zona aman PBB" sebagai daerah penampungan warga sipil Bosnia yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang bersenjata (dengan pengecualian untuk tentara PBB tentunya). Ada 6 daerah yang dijadikan zona aman PBB, yaitu Sarajeyo, Srebrenica, Gorazde, Tuzla, Zepa, & Bihac.

Bulan Maret 1994, via perundingan yang difasilitasi oleh AS di ibukota Washington, perwakilan Kroasia-Bosnia & Bosniak sepakat untuk berhenti memerangi satu sama lain. Kedua belah pihak juga sepakat menyatukan wilayah kekuasaannya masing-masing menjadi "Federasi Bosnia & Herzegovina". Dengan dicapainya kesepakatan ini, konflik di Bosnia pun kembali mengerecut menjadi konflik 2 sisi antara pasukan etnis Kroasia & Bosniak melawan pasukan etnis Serbia. Dikombinasikan dengan bantuan persenjataan & serangan udara pasukan NATO, pasukan koalisi Bosniak-Kroasia sukses menaklukkan wilayah demi wilayah yang awalnya dikuasai oleh pasukan etnis Serbia. Situasi makin runyam bagi etnis Serbia karena sanksi embargo yang dijatuhkan PBB atas Yugoslavia membuat Yugoslavia dilanda krisis ekonomi (http://www.re-tawon.com/2015/03/perang-bosnia-banjir-darah-di-jantung.html).

2. Upaya Damai (Perjanjian Dayton)

Tanggal 14 Desember 1995, pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan damai akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dalam wujud Perjanjian Dayton. Via perjanjian damai ini, pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Bosnia akan berhenti mengangkat senjata. Sebuah badan yang dipimpin oleh orang luar Bosnia dibentuk oleh PBB untuk membantu mengawasi jalannya pemerintahan & perdamaian. Lalu untuk urusan keamanan, NATO menerjunkan puluhan ribut tentaranya di wilayah Bosnia. Dicapainya Perjanjian Dayton sekaligus menandai berakhirnya Perang Bosnia secara resmi.

Perang Bosnia merupakan konflik paling berdarah dalam periode perpecahan Yugoslavia. Jumlah korban tewas akibat perang ini dilaporkan mencapai lebih dari 100.000 jiwa. Selain korban jiwa, Perang Bosnia juga membuat lebih dari 2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Tingginya korban dalam Perang Bosnia tidak lepas dari kebijakan pihak-pihak yang bertikai untuk membantai & menggusur paksa penduduk dari etnis rivalnya, supaya wilayah yang baru saja dikuasai nantinya bisa ditempati oleh penduduk etnisnya sendiri. Pasca perang, sebuah komisi khusus dibentuk oleh PBB untuk mengadili orang-orang yang diduga ikut terlibat dalam kegiatan genosida & kejahatan kemanusiaan di Bosnia.

Perjanjian Dayton menjamin status Bosnia sebagai negara merdeka, namun dengan perombakan signifikan dalam sistem politik & administrasinya. Bosnia dijadikan negara republik federasi yang terdiri dari 2 negara bagian utama: Federasi Bosnia-Herzegovina yang berpenduduk mayoritas Bosniak & Kroasia, serta Republik Sprska yang berpenduduk mayoritas Serbia. Masing-masing negara bagian diberi kebebasan luas dalam hal pengelolaan urusan internalnya. Khusus untuk daerah Brcko yang terletak di perbatasan Federasi BH & Srpska bagian utara, daerah tersebut dianggap sebagai daerah yang terpisah dari 2 negara bagian tadi & berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat. (http://www.re-tawon.com/2015/03/perang-bosnia-banjir-darah-di-jantung.html)